

# MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025

## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu  
Kalimantan Barat, 78716, Telepon (0567) 21003  
Faksimile (0567) 21397  
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>  
Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397

Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

---

**NOTULEN RAPAT**

**MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025**

Rapat	: Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025
Hari/Tanggal	: Selasa, 14 Oktober 2025
Surat Undangan	: 700.1.2.7/3679/SETDA/PERKEU Tanggal 10 Oktober 2025
Waktu Rapat	: 08:30 WIB – selesai
Acara	: Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025
Pimpinan Rapat	: Willy Brordus Lasah, S.E.
Ketua	: Teodolus Teddy Hinggaan, S.T.
Sekretaris	: Nicolaus Purwanto, S.IP
Pencatat	: Vilaria Laudra Aprilianti, S.E
Peserta Rapat	: Daftar Terlampir

**Kegiatan Rapat :**

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Plt. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Kapuas Hulu sekaligus memberikan arahan kepada peserta rapat terkait dengan pencapaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2025.

**1. Penyampaian Plt. Asisten Administrasi Umum**

Monev adalah suatu kegiatan rutin yang harus dilakukan di setiap Perangkat Daerah sebagai bentuk pengawasan internal monev kinerja Sekretariat Daerah yang membawahi 9 bagian tentunya kinerja pegawai dinilai dan dituntut sebagai bentuk penilaian kinerja setiap tahunnya salah satunya adalah SAKIP. Seperti yang terlihat pada tabel yang menyajikan data tentang kinerja yang sudah tercapai dari masing-masing bagian sampai dengan triwulan III. Dari data ini tabel yang berwarna merah dan kuning dan masih ada 1 Triwulan lagi, masih ada waktu untuk mengejar persoalan atau permasalahan yang masih belum tercapai. Terkait dengan SAKIP semoga kedepannya nilainya meningkat sehingga Sekretariat Daerah ini bisa dijadikan contoh atau panutan bagi OPD lain. Terkait dengan tabel yang berwarna kuning tidak mencapai target sehingga menjadi bahan evaluasi dan tabel yang berwarna merah melebihi target. Untuk yang berwarna

kuning nanti masing-masing bagian bisa menyampaikan permasalahannya. Terkait yang berwarna merah angka skor atau nilai jauh melebihi target, yang melebihi persentase target bukannya tidak bagus tapi perencanaannya yang mungkin perlu dievaluasi sehingga mungkin targetnya terlalu kecil sehingga pencapaiannya kesannya luar biasa. Sehingga kedepannya bisa dijadikan bahan evaluasi. Dalam menentukan target yang ingin dicapai dasar perhitungannya mungkin tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya. Kalau secara statistik memang sesuatu bisa dihitung dengan acuan 5 tahun berjalan. Dari tabel yang disajikan mari bersama-sama diskusi dan melihat permasalahan dan solusinya seperti apa dan dipaparkan apa maksud dari data yang ada pada tabel, menelaah dan menganalisa di masing-masing bagian.

Hasil pengukuran kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretaris Daerah sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>																			
									<b>RATA-RATA</b>	<b>63,38</b>	<b>RATA-RATA TOTAL</b>		<b>27,13</b>	<b>109.910.889.604</b>	<b>72.468.021.897</b>	<b>65,93</b>	<b>-2,56</b>	<b>-</b>	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	0	67	0	0	66,7	70,18	WY3E	82,97	100	66,67	54.837.811.229	41.588.194.154	75,84	5,69	Sekretaris Daerah
an 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	47	35	6	0	88,24	92,88	WY3E	100	95	92,88					
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA	Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	11	5	5	0	21,1	21,05	WY3E	0	100	21,05	1.652.600.800	1.098.991.123	66,50	-45,45	Sekretaris Daerah
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	67,5	Nilai	60	60	68	0	67,5	100,00	WY3E	60,4	79	85,44	53.420.477.575	29.780.836.620	55,75	0,35	Sekretaris Daerah
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	10	0	2	0	12,2	12,20	WY3E	0	100	71,43					
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84	Nilai	0	0	86	0	85,9	102,26	WY3E	87,78	88	97,61	0	0	####	#DIV/0!	Perkeu

**A. Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2024 sudah dikeluarkan oleh pihak Inspektorat sehingga mendapat Nilai 67,5 dengan Predikat B memang pencapaian yang masih rendah/kurang sehingga memang harus di tingkatkan lagi karena target pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebenarnya adalah BB bukan B. Berkaitan dengan nilai SAKIP Plt. Asisten Administrasi Umum berharap agar memaksimalkan kinerja dalam peningkatan nilai SAKIP. Tentunya perlu dukungan dari bagian-bagian dan kerjasama tim. Kedepannya semoga nilai SAKIP Sekretariat Daerah bisa meningkat agar bisa menjadi panutan bagi OPD lain.

**B. LPPD**

Bahwa penilaian terhadap LPPD tidak setiap tahun dikeluarkan oleh pihak Kementerian Dalam Negeri sehingga apabila tetap menggunakan indikator tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan rendahnya capaian terkait indikator tersebut. Penilaian terhadap LPPD terakhir dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 April 2025 dengan nilai 2,8143.

**C. IKM**

Terkait nilai IKM target nilainya 84 dan sampai dengan TW III yaitu sudah terealisasi dengan nilai 85,9 dengan capaian 102,26% melebihi target yang ditentukan dan harapannya kedepannya nilai IKM bisa lebih meningkat lagi.

**2. Asisten Administrasi Umum**

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Administrasi Umum sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.01	Meningkatnya kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	41	Dok	4	0	0	0	4,0	9,76	33,33%	0	151	2,65	49.509.808.771	16.624.026.914	33,58	-23,82	Asistem Adum

Asisten Administrasi Umum memaparkan, pada triwulan III bagian-bagian yang capaian masih rendah agar memperhatikan progress kegiatan masing-masing. Salah satu hal yang dilakukan adalah merencanakan dan melaksanakan kegiatan diawal tahun berjalan dan diharapkan agar bagian-bagian lebih memperhatikan daya serap realisasi. Asisten Administrasi Umum berharap untuk selalu tetap mempertahankan kinerja yang terbaik dan memenuhi bukti dukung karena bukti dukung adalah sesuatu yang sangat penting yang merupakan ukuran dalam akuntabel tidaknya sebuah kinerja. Asisten Administrasi Umum juga memaparkan, masih ada beberapa kegiatan yang di bawah 60% termasuk di bagian Prokopim ada 1 kegiatan Terlaksananya Pendokumentasian sampai TW III baru 36,84% realisasinya. Diusahakan di akhir tahun serapan anggaran tercapai 99-100%. Serapan anggaran ini untuk penentuan tahun berikutnya.

**3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Reali sasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.02	Meningkatnya kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Kbjkn	7	6	0	0	13,0	68,42	33,33%	0	95	13,68	54.602.822.429	21.300.236.567	38,95	29,48	Asistem Perm Kesra

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaparkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir triwulan III dari *output* dan *outcome* masih belum tercapai sesuai dengan target, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang

capaiannya banyak direalisasikan pada triwulan IV, maka dari itu diperlukan percepatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan berfokus pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dengan target yang telah ditentukan. Melihat daya serap realisasi yang masih rendah diharapkan agar menjadi perhatian bersama terkait pelaksanaan kegiatan yang belum selesai. Diharapkan agar dikontrol masing-masing Kepala Bagian.

#### 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Hasil pengukuran kinerja dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

##### Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Rencana		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
4.01.03	Meningkatnya kualitas kebijakan Perekonomian, Pembangunan dan SDA	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	19	Dok	0	1	0	0	1,0	5,26	100% (K/13E)	0	95	1,05	1.582.640.800	499.884.825	31,59	-26,32	Asisten Ekbang

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan, masing-masing bagian bisa mengidentifikasi kelemahan pada setiap kegiatan yang belum tercapai pada triwulan III dan mengevaluasi agar capaian kinerja dan realisasi anggaran pada triwulan IV nanti dapat tercapai sesuai dengan target. Asisten Perekonomian dan Pembangunan memaparkan untuk *output* dan *outcome* yang realisasinya belum tercapai pada triwulan III karena target dalam bentuk laporan dan capainnya terpenuhi di akhir tahun atau pada TW IV. Diharapkan agar dikontrol masing-masing Kepala Bagian. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III hendaknya memperhatikan target yang telah ditetapkan serta tetap menjaga komitmen bersama dalam usaha pencapaiannya.

#### 5. Paparan Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan memaparkan, membahas Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW III Tahun 2025 untuk bersama-sama melihat tabel terkait kinerja, jadi monev adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan terkait juga untuk penilaian SAKIP. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah sudah berada pada nilai 67,5 berada pada predikat B, untuk mencapai predikat BB nilai yang harus dicapai harus diatas 70. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan berharap semoga dengan semakin intens diskusi terkait kinerja dapat segera meraih nilai BB. Berkaitan dengan tabel secara keseluruhan dari hasil yang diinput datanya oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan dan memaparkan terkait hal-hal seperti tabel yang berwarna kuning belum mencapai target

bukan tidak dilakukan, biasanya laporannya dikumpulkan diakhir tahun dan indikator yang digunakan sudah menggunakan indikator terbaru dalam renstra yang terbaru. Terkait tabel yang berwarna merah ada beberapa yang sudah sangat jauh melebihi target, ini menjadi catatan yang jauh melebihi target bukan semakin baik tapi mungkin dari sisi perencanaan yang kurang baik karena penentuan target sangat minim sedangkan capaian sangat tinggi. Mungkin akan melakukan revisi target supaya nanti capaiannya tidak terlalu jauh selisihnya, mungkin nanti catatan-catatan dapat dilihat dari masing-masing bagian supaya dapat disampaikan secara keseluruhan. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan menyampaikan, Keuangan sudah berjalan semestinya karena hal-hal rutin termasuk gaji semuanya sudah berjalan dan pada tabel ada 1 yang masih kuning jumlah dokumen dan memang itu pemenuhannya di akhir tahun dan bentuknya juga seperti Lkjlj juga akan kita lakukan laporan. Hal yang cukup baru di bagian Perencanaan dan Keuangan adalah Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah di Bagian Perencanaan dan Keuangan juga menangani hal terkait Walidata berhubungan Diskominfo kita wajib menjalankan data-data terkait dengan Sekretariat Daerah kami selalu meminta data-data dari setiap bagian. Karena ini hal yang baru kalau dilihat dari kolom anggaran sepertinya masih nol semua, baik anggaran maupun realisasinya. Kedepannya Walidata menjadi salah satu tanggung jawab dari Bagian Perencanaan dan Keuangan terkait data yang ada pada Sekretariat Daerah. Walidata ini berdampak juga dengan SIPD. Dimohon kepada bagian ketika kami bagian Perencanaan dan Keuangan meminta data terkait Walidata bisa di bantu dari bagian-bagian untuk responnya karena hubungannya dengan SIPD.

## 6. Paparan Kepala Bagian Umum

Hasil pengukuran kinerja Bagian Umum sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

### Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr1	Tr2	Tr3	Tr4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%			
4.01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	100	0	0	0	100,0	105,26	BayXVr3E2o	100	95	105,26	507.465.400	173.675.200	34,22	71,04	Umum	
01.2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	6zJgW4fj	1	5	20,00	20.880.000	5.855.000	28,04	71,96	Umum	
01.2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	QwW4tQv	1	5	20,00	14.600.000	2.479.000	16,98	83,02	Umum	
01.2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	98.698.300	6.035.500	6,12	93,88	Umum	
01.2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	22.975.000	8.700.000	37,87	62,13	Umum	
01.2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	350.312.100	150.605.700	42,99	57,01	Umum	
4.01.01.2.05	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku	90	%	81	0	0	0	80,8	89,76	Tidak Ada	0	90	89,76	2.603.308.589	1.536.379.544	59,02	30,74	Umum	
01.2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	120.400.000	36.000.000	29,90	20,10	Umum	
01.2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	150.000.000	0	0,00	0,00	Umum	
01.2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bln	3	3	0	0	6,0	50,00	Tidak Ada	12	60	10,00	2.159.551.589	1.500.379.544	69,48	-19,48	Umum	
01.2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	60	0,00	56.165.000	0	0,00	0,00	Umum	
01.2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	60	0,00	14.520.000	0	0,00	0,00	Umum	

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d Juni	%		
11.2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	0	0,0	0,00	-	10	50	0,00	102.672.000	0	0,00	0,00	Umum
<b>4.01.01.2.06</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>11.765.962.780</b>	<b>2.536.560.405</b>	<b>21,56</b>	<b>-21,56</b>	<b>Umum</b>
11.2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	0	0	1,0	100,00	Z_IVDRVX	1	5	20,00	4.225.096.350	0	0,00	100,00	Umum
11.2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	194.337.500	0	0,00	0,00	Umum
11.2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	211.014.000	0	0,00	0,00	Umum
11.2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,3	5	0,00	137.530.000	0	0,00	0,00	Umum
11.2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,13	5	0,00	133.011.180	0	0,00	0,00	Umum
11.2.06.0006	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Lanjutan	2	5	0	0	7,0	23,33	UnitHRBns	30	150	4,67	1.619.138.000	779.875.000	48,17	-24,83	Umum
11.2.06.0009	Tersedianya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan	4	6	0	0	10,0	0,67	rp_ZowRbu	0	7500	0,13	5.074.145.750	1.727.643.405	34,05	-33,38	Umum
11.2.06.0010	Tersedianya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	0	0	0	1,0	100,00	Tidak Ada	1	5	20,00	171.690.000	29.042.000	16,92	83,08	Umum
<b>4.01.01.2.07</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.559.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Umum</b>
11.2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	19	0,00	3.320.010.000	0	0,00	0,00	Umum
11.2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	650	3250	0,00	239.414.000	0	0,00	0,00	Umum
<b>4.01.01.2.08</b>	<b>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.441.000</b>	<b>1.105.986.339</b>	<b>30,17</b>	<b>-30,17</b>	<b>Umum</b>
11.2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	SDSzgqbtVU	0	20224	0,03	44.714.000	18.120.000	40,52	9,48	Umum
11.2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	ak0WzJvCs	0	60	10,00	1.505.000.000	633.918.200	42,12	7,88	Umum
11.2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	5	0	0	5,0	41,67	K02PHml_4	0	36	13,89	794.515.000	289.300.000	36,41	5,25	Umum
11.2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	3	0	0	3,0	25,00	YbwPWVVU	0	60	5,00	1.321.212.000	164.648.139	12,46	12,54	Umum
<b>4.01.01.2.09</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.994.945</b>	<b>216.492.874</b>	<b>11,76</b>	<b>-11,76</b>	<b>Umum</b>
11.2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	34	Unit	3	0	0	0	3,0	8,82	JvIFDZcbjja	34	191	1,57	881.544.945	30.654.460	3,48	5,35	UMUM
11.2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	3	2	0	0	5,0	45,45	ANPop_Ra	11	55	9,09	584.200.000	164.684.700	28,19	17,26	UMUM
11.2.09.0009	Terpenulihnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	0	0	1,0	50,00	-	2	10	10,00	375.250.000	21.153.714	5,64	44,36	UMUM
<b>4.01.01.2.11</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>50,00</b>	<b>950.447.000</b>	<b>352.517.698</b>	<b>37,09</b>	<b>12,91</b>	<b>UMUM</b>
11.2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	XBDCrTMy	0	60	10,00	480.231.000	152.537.698	31,76	18,24	UMUM
11.2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Layanan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	30	0,00	66.500.000	0	0,00	0,00	UMUM
11.2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	0	0	6,0	50,00	DCIqKak6zI	0	20	30,00	403.716.000	199.980.000	49,53	0,47	UMUM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Umum sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyampaian Bapak Abdias Welly Amat, S.IP. selaku Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Terkait Sub Kegiatan Terlaksananya Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Barang Milik Daerah belum ada data dukung karena sebenarnya rekon dilaksanakan tiap triwulan bersama dengan bidang Aset BKAD, penyampaian laporan setiap akhir triwulan tetapi proses finalisasinya ada di BKAD. Data anggarannya disesuaikan dengan data anggaran kemudian data aset final ada di BKAD. Sampai dengan triwulan ketiga belum menerima data final dari BKAD. Masalah di kepegawaian tidak ada data dukung.

### 7. Bagian Kepala Bagian Organisasi

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Organisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan III	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	2	PD	0	0	1	0	1,0	50,00	0R.L.No	0	3	33,33	595.519.000	296.157.992	49,73	14,72	ORGANISASI
.2.13.ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	1	0,00					ORGANISASI
.2.13.ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10	PD	6	6	6	0	12,0	120,00	0R.Jo.KT	7	50	24,00					ORGANISASI
.2.13.ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	PD	6	6	6	0	6,0	75,00	8Qe.Br	6	8	75,00					ORGANISASI
.2.13.ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	22	PD	3	9	5	0	17,0	77,27	XNfrcg	DE SALA	26	65,38					ORGANISASI
2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	GRM04	0	1	0,00	200.259.500	89.646.332	44,77	-11,77	ORGANISASI
.0001.ind2		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	50	PD	10	7	16	0	33,0	66,00	Pjpw6	0	50	66,00					ORGANISASI
2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	PD	6	6	6	0	12,0	44,44	u67B73L	0	50	24,00	189.909.500	108.155.500	56,95	25,27	ORGANISASI
.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	10	PD	6	6	6	0	12,0	120,00	0HuF3E	0	50	24,00					ORGANISASI
2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	15	10	15	0	40,0	80,00	KrDwZB	0	50	80,00	205.350.000	98.356.160	47,90	29,60	ORGANISASI
.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8	PD	6	6	6	0	6,0	75,00	0v848G	0	8	75,00					ORGANISASI

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Organisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyampaian Gita Suryana, S.E.,M.A.P selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk di Bagian Organisasi dengan 1 Sasaran dan 5 Indikator. Untuk Indikator Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP B Minimal B kemarin sudah disesuaikan karena yang ditetapkan 22 sedangkan ternyata yang sekarang B itu terealisasi sampai dengan triwulan III 17 sisanya naik menjadi BB jadi kami tetapkan menjadi Minimum. Untuk Indikator Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran ada kendala awalnya targetnya berdasarkan telaahan dari Daerah Diskominfo dengan Bapperida terkait dengan Kebijakan sementara hasil sampai dengan saat ini mesti akan di tetapkan di SOTK sampai dengan TW III sudah tercapai Perangkat Daerah yang menjadi penilaian Menpan RB akan di sesuaikan.

b. Penyampaian Isnaini Dwi Puspita, S. STP., M.AP. selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Terkait di bidang Kelembagaan kami informasikan bahwasannya untuk tahun ini kita lakukan 2 tempat yaitu Bapedda dan Kominfo. Karena kondisi yang memungkinkan untuk ditindaklanjuti adalah perubahan pada Bapedda menjadi Bapperida itu harus dilakukan dengan perubahan sudah kita lakukan dan ditetapkan pada bulan Agustus 2025 sehingga harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati yang menangani tentang Kedudukan SOTK tersebut sehingga untuk Perbup sedang berproses untuk ditetapkan. Ketika kita melakukan kajian kembali terhadap urusan tersebut ternyata ada kendala sedikit dalam perhitungan tersebut yang mana sebenarnya dari Pemerintah Provinsi sudah keluar

namun ternyata setelah dikaji kembali untuk perhitungannya kurang tepat dari Provinsi. Terkait di bidang Kelembagaan ada Penilaian Kematangan Mandiri untuk seluruh Perangkat Daerah sudah dilakukan untuk tahun 2024 kemarin untuk Pemerintah Daerah sendiri mendapatkan nilai Kematangan di 36 dengan kategori sedang jadi berdasarkan nilai kematangan tersebut di setiap Perangkat Daerah masih banyak nilai yang sedang. Untuk Perangkat Daerah di Kabupaten ada sekitar 8 Perangkat Daerah yang masih dalam kategori sedang yang mana nilai sebelumnya rendah. Untuk Perangkat Kecamatan baru 5 Perangkat yang tinggi sedangkan yang lainnya masih sedang. Ada 1 Perangkat di Kecamatan yang masih sangat rendah tentunya ini berpengaruh kepada penilaian kematangan ditingkat kabupaten jadi mungkin kedepannya dari Bagian Organisasi akan melakukan upaya pendampingan terhadap penilaian kematangan tersebut yang mana tadi yang nilainya masih sedang kita upayakan naik menjadi tinggi, dan yang rendah masih 1 Kecamatan di Silat Hilir sangat rendah. Dalam penilaian tersebut banyak indikator yang harus kita lakukan terhadap penilaian. Kedepannya kita rencana lagi akan buat tim, tim ini nanti melibatkan dari unsur Perencanaan, Pengawasan, Keuangan dari Organisasi juga dari Kepegawaian sehingga nanti dari 11 variabel yang masing-masing unsur akan melihat kevalidan data yang akan disampaikan ke Pemerintah Provinsi. Untuk saat ini di kita belum ada tim penilaian kematangan hanya ada di Organisasi pengumpulan data dan dilakukan penilaian. Idealnya harapan kami ketika nilai yang dinilai misalnya tinggi, harapannya sesuai dengan di kinerja. Harus ada keselarasan antara nilai kematangan PD termasuk asistensi untuk melaksanakan tugas dengan hasil kinerja yang dihasilkan. Terkait fasilitasi untuk bidang kelembagaan PD yang mengajukan ke bagian organisasi terhadap penyesuaian kembali SOTK dari tahun 2023 ada 3 dan tahun 2024 ada 3 dan sudah ditindaklanjuti dan ditanggapi melalui telaah sebanyak 3 surat ke Perangkat Daerah terkait usulan misalnya penyesuaian kembali SOTK PD tersebut.

Untuk bidang Anjab pada saat ini kami masih berproses dalam penyusunan anjab, outputnya adalah informasi jabatan berupa Surat Keputusan Bupati. Terkait dokumen anjab Perangkat Daerah yang sudah masuk di bagian Hukum 1 Perangkat Daerah yang akan kita tetapkan kemudian yang lainnya masih dalam proses. Kendala yang kami hadapi di bidang anjab adalah adanya perubahan peraturan yang sangat dinamis oleh Pemerintah Pusat yang tadinya sudah kita lakukan penyesuaian data, penyusunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tiba-tiba sudah 2 kali berubah sehingga yang membuat repot di Bagian Organisasi untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap peraturan tersebut. Dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di tingkat pusat dampaknya di daerah untuk penyesuaian tersebut yang mana mungkin dari kami sendiri dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia harus melakukan analisis kajian terhadap kebijakan tersebut.

### 8. Paparan dari Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
01.01.2.14	Meningkatnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	81	%	27	18	32	0	77,3	95,40	trAScQd	0	86	89,85					PROKOPIM
2.14.ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	82	%	41	45	12	0	97,6	119,08	IP9s_Nd	0	85	114,88	8.605.912.300	4.529.937.554	52,64	54,94	PROKOPIM
2.14.ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	86	%	23	24	46	0	93,1	108,26	z77pXP8	0	90	103,45					PROKOPIM
2.14.0001	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitas Keprotokolan	110	Lyn	30	20	35	0	85,0	77,27	trAScQd	1	576	14,76	3.947.813.000	2.289.785.717	58,25	19,02	PROKOPIM
2.14.0002	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi	Jumlah Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	85	Lyn	35	38	10	0	83,0	97,65	IP9s_Nd	1	448	18,53	1.809.264.500	1.180.775.937	65,26	32,38	PROKOPIM
2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87	Lyn	20	21	40	0	81,0	93,10	z77pXP8	1	436	18,58	2.848.834.800	1.049.375.900	36,84	56,27	PROKOPIM

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH 2025>

Kinerja Protokol dan Komunikasi Pimpinan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyampaian Alberto Deo Prawira, S.Kom. selaku Penata Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk di bagian prokopim sampai dengan TW III sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan target. Sampai dengan TW III bagian Prokopim tidak mengalami kendala.

### 9. Paparan Kepala Bagian Tata Pemerintahan

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

#### Hasil Pengukuran Kinerja

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr.1	Tr.2	Tr.3	Tr.4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	%	0	69	0	0	69,4	102,12	Feer 127	0	72	96,45					TAPEM
2.01.ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78	%	0	0	74	0	73,9	94,76	9NhrRJE	0	90	82,13	540.318.500	363.194.658	67,22	31,74	TAPEM
2.01.ind3	Meningkatnya kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD) Kabupaten	Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100	0	0	0	100,0	100,00	W0icx9z	0	100	100,00					TAPEM
2.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	139.892.500	82.551.008	59,01	-59,01	TAPEM
2.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	139.997.000	46.743.300	33,63	-33,63	TAPEM
2.01.0003	Terfasilitasinya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dok	1	1	0	0	2,0	100,00	zzZMLhb	1	10	20,00	261.429.000	233.900.350	89,47	10,53	TAPEM
01.02.2.04	Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah	Persentase Kerjasama Wajib Daerah	100	%	0	43	43	0	85,7	85,71	MQQ 7b	91,3	100	85,71	133.728.000	51.502.600	38,51	47,20	TAPEM
2.04.0001		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	7	Dok	0	3	3	0	6,0	85,71	MQQ 7b	0	41	14,63	133.728.000	51.502.600	38,51	47,20

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH 2025>

Kinerja Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyampaian Bapak Hermanus Susanto, M.Si selaku Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Pada Bagian Tata Pemerintahan masih ada 2 Sub Kegiatan yang belum tercapai yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah bahwa sedang berproses SK sedang dinaikkan ke Bagian Hukum karena masih dalam tahap harmonisasi dan perbaikan ini tentang Kecamatan. Yang kedua untuk Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan sudah di proses mengambil data di lapangan kemudian dimasukkan di Aplikasi SINAR dimana disini ada surveyiornya kemudian verifikasi kemudian di verifikasi oleh Badan Informasi dan Geospasial (BIG). Sebagai laporan bahwa Bagian Tata Pemerintahan menargetkan 5 Batas Kecamatan yang diselesaikan dan sudah keluar Perbup. Kemudian untuk penyelesaian Tapal Batas memang agak rumit misalnya di Kecamatan Putussibau Utara dan Putussibau Selatan antara Kedamin Hilir dengan Sambus dengan Ariung Mendalam dengan Pala Pulau banyak proses yang dilakukan, bahkan kami antar batas antara Sambus dengan Ariung Mendalam 4-5 kali turun lapangan, sudah di tetapkan tetapi saat ke lapangan berubah lagi dengan berbagai macam alasan sehingga seperti ini target kami yang kami laksanakan di Bagian Pemerintahan lama prosesnya.
  
- b. Tanggapan Bapak Gita Suryana, S.E.,M.A.P selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Untuk tabel yang berwarna kuning sebenarnya laporannya di akhir tahun yang disusun pada bulan Desember Laporan Akhir Tahun yang disusun pada periode Desember ini akan disampaikan ke Provinsi terkait dengan Batas Wilayah dan Penyelesaian Rupabumi. Ada kesulitan terkait batas terlihat pada tabel masih kosong sebenarnya untuk penyelesaian batas di Bagian Tata Pemerintahan untuk tahun ini semuanya sudah selesai. Tapi karena memang targetnya itu 3 sudah disampaikan dan sampai saat ini memang Perbup yang kami ajukan tahun 2024 ada 1 Kecamatan yang sampai saat ini masih di Provinsi sehingga kesulitan karena tetap akan nol. Karena nanti data dukungnya adalah Perbup. Tiga sudah ditetapkan dan 1 masih dalam proses.
  
- c. Tanggapan Ibu Ratna Juwita, S.H., M.H.selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Untuk Perbup Perdes Kecamatan Jongkong sudah di Konfirmasi ke Biro Hukum ketinggalan, Bagian Biro Hukum lupa menyampaikan ke kita. Nanti akan kami cek lagi ke Bagian Biro Hukum karena di register mereka sudah, tapi belum di berikan ke Bagian Hukum. Dan kami pun kurang teliti untuk *cross check* Perbup yang sudah selesai apakah sudah disampaikan atau belum. Kami sudah merekap untuk tahun 2024 Perbup apa saja yang belum disampaikan.

**10. Paparan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%			
2.02.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	12	Kebijaka	7	4	0	0	11,0	91,67	SHIG.6	0	56	19,64						KESRA
2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	53.770.150.459	40.941.221.402	76,14	-12,25		KESRA
2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	4	Kebijaka	1	2	1	0	4,0	100,00	KQeEIKTF	0	20	20,00						
2.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Dok	0	1	1	1	3,0	100,00	JyWQoS	325	15	20,00	53.379.886.259	40.719.760.229	76,28	23,72		KESRA
2.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dok	0	1	0	0	1,0	100,00	rri5srZZ	101	5	20,00	207.507.200	109.225.468	52,64	47,36		KESRA
2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translumb Linnas	3	Dok	1	1	1	0	3,0	100,00	gppziJLs	2	15	20,00	182.757.000	112.235.705	61,41	38,59		KESRA

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyampaian Bapak Elias Kinson, S.E selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Pada tabel terlihat ada 1 capaian Kinerja yang berwarna kuning dan nilainya masih nol dan ada kegiatan Kesejahteraan Sosial yang memang belum terlaksana, dan ada 1 Kebijakan Belanja Bantuan Sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya artinya suatu kondisi yang urgent yang tidak bisa kita prediksi. Tetapi nanti puncak akhirnya adalah Surat Keputusan Bupati. Saat ini kami sudah memproses 2 kali Nota Dinas dan Telaah Staf dan yang ketiga sekarang ini sedang naik ke Bupati. Karena ini berkaitan dengan Penetapan Kebijakan Pimpinan dan kita tidak bisa mengambil Keputusan sendiri, kemudian dari dana yang tersedia ini baru kurang lebih 70 % dan terlihat pada tabel sepertinya nol karena memang nanti upload evidence terakhir adalah SK Bupati.

Di Bidang Bina Mental Fasilitasi Kebijakan memang masih ada 2 yang belum mudah-mudahan di bulan ketiga Oktober 2 SK ini bisa di tanda tangani oleh Bapak Bupati. Untuk bidang Kesmas memang sudah semua hanya berkaitan nanti dengan dokumen yang Bagian Kesra proses pada bulan November adalah laporan kegiatan karena ada kegiatan yang baru di proses seperti Monitoring dan evaluasi sudah dilakukan. Kemudian laporan mahasiswa kedokteran karena ini memang SK baru turun dan sudah selesai tetapi laporan kegiatannya karena kami harus monitoring dulu ke Fakultas Kedokteran. Kemudian Laporan kegiatan Lintas Sektor belum karena targetnya 1 laporan rekap kegiatan yang juga akan direkap di bulan Desember, sehingga nanti semua target yang dicapai baru bisa kelihatan progresnya. Sampai saat ini serapan anggaran setelah perubahan APBD secara keseluruhan 76,28% dan masih ada 23,8 % serapan anggaran.

- b. Tanggapan Bapak Gita Suryana, S.E.,M.A.P selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
- Sampai dengan Triwulan III tidak terlihat adanya realisasi atau capaian kinerja dalam melakukan Monitoring Evaluasi, dengan kondisi ini untuk semua bagian dilaksanakan ketika ada satu target yang bentuknya Produk Hukum atau Kebijakan tidak akan bersifat yang incidental misal tercapai setiap triwulan bisa saja nanti di akhir tahun baru tercapai. Dengan kondisi ini kami menyarankan Bagian Keuangan memonitoring, jadi bagian-bagian melakukan rapat internal terkait dengan progress capaiannya, sehingga ketika kita monev seperti ini kita konfirmasi dari bagian ke Pimpinan bentuknya laporan Internal misalnya terlihat pada tabel yang capaian nol, di buat laporan analisis yang tertulis sehingga progresnya akan terlihat dan dijelaskan dilaporannya mengapa masih nol. Ketika dievaluasi akan terlihat mengapa nol. Untuk kebijakan masih nol mungkin yang ditergetkan bentuknya adalah Surat Keputusan atau Peraturan Bupati. Sampai dengan TW III ini apa yang sudah kita lakukan karena disitu anggaran juga sudah terlaksana tetapi capaian nol inilah yang harus dipertanggungjawabkan.

**11. Paparan Kepala Bagian Hukum**

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat.	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2025	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%			
01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	%	27	27	34	0	87,8	107,10	107,10	82,125	90	97,58						HUKUM
2.03.ind2	perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Bantuan Hukum	77	%	46	0	31	0	76,9	99,90	99,90	86,67	90	85,47	393.614.270	232.275.494	59,01	69,17	HUKUM	
2.03.ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	70	%	16	66	43	0	124,3	177,55	177,55	50	90	138,10					HUKUM	
2.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	Dok	147	150	186	0	483,0	107,33	107,33	618	3230	14,95	177.329.170	122.239.208	68,93	38,40	HUKUM	
2.03.0002	Terlaksananya Fasilitas Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	13	Kasus	6	0	4	0	10,0	76,92	76,92	10	53	18,87	120.010.000	75.075.300	62,56	14,37	HUKUM	
2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	produk Hu	11	46	30	0	87,0	124,29	124,29	21	146	59,59	96.275.100	34.960.986	36,31	87,97	HUKUM	

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Hukum sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyampaian Ibu Ratna Juwita, S.H., M.H. selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Berkenaan dengan tabel yang masih berwarna merah yang melebihi target ada beberapa hal yang perlu dijelaskan mengapa tabel berwarna merah. Jadi berdasarkan rekomendasi penilaian IRH bahwa mengenai pengelolaan JDIIH harus melakukan pembenahan dalam pengelolaan JDIIH sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum sehingga memenuhi seluruh indikator kinerja JDIIH. Jadi mengapa sampai dengan TW III melebihi target untuk Penyebarluasan Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi

Hukum, karena ada beberapa item yang ditambahkan di aplikasi JDIH karena selama ini hanya Produk Hukum Daerah saja yang di share di JDIH. Karena selama ini Produk Hukum Daerah saja yang kami sebarluaskan, jadi untuk Penyebarluasan Produk Hukum di tambah slot Peraturan Pemerintah, Permendagri, Undang-Undang dan Perdes. Mengapa warna merah atau melebihi target dari yang telah ditetapkan tahun 2025 ini karena ada slot terukur yang ditambahkan. jadi jika memang memungkinkan untuk diadakan perubahan target tahun 2025 kami sampaikan sesuai dengan target 2025 sehingga tidak melebihi target pada tahun 2025 maka kami menyampaikan sesuai dengan yang bisa kami targetkan sehingga tidak melebihi target 2025. Berdasarkan tabel yang berwarna kuning yang tidak memenuhi target Persentase Kebijakan Harmonis karena mengingat efisiensi yang sebenarnya ditargetkan 67 dengan jumlah Kebijakan Harmonis 12 Jumlah kebijakan yang dibuat 57 karena berdasarkan dengan Register yaitu penetapan dari Perda dan Perbup yang mana Perda pada tahun 2024 jumlahnya 8 Terkait yang kurang dari target kami akan minta untuk permohonan untuk mengubah target, mengingat efisiensi mungkin Kebijakan yang Harmonis kurang dari target karena terkait efisiensi sampai sekarang Kebijakan yang Harmonis yang sudah melalui proses harmonisasi 12 Produk Hukum Daerah. Permasalahan di Bagian Hukum adalah Capaian Kinerja melebihi target. Solusinya adalah berusaha merevisi target yang sudah ditetapkan akan dilakukan dalam perubahan APBD karena harus berkonsultasi juga dengan Kabag Hukum untuk ditindaklanjuti.

- b. Tanggapan Bapak Gita Suryana, S.E.,M.A.P selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Terkait dengan apa yang disampaikan teman-teman di Bagian Hukum bahwa ketika ada suatu arah Kebijakan yang berubah akan mempengaruhi capaian target kinerja. Intinya bahwa capaian yang lebih dari 100% bukan prestasi yang bagus atau capaian yang sangat rendah sehingga kita menjaga supaya antara Perencanaan dengan realisasi tidak terlalu signifikan. Intinya nanti teman-teman bisa menyesuaikan dan mengidentifikasi lebih detail lagi terkait dengan targetnya. Di perubahan ini sangat dimungkinkan diubah sehingga nanti tidak ada lagi istilahnya capaian sampai dengan 177% artinya kurang strategis sehingga sangat disarankan juga nanti terkait dengan dampak efisiensi tentu juga akan mempengaruhi capaian kinerja sehingga apa yang sudah menjadi target yang tadinya sudah ditetapkan tinggi bisa saja sampai dengan triwulan III menjadi rendah. Bagian Perencanaan dan Keuangan bisa memfasilitasi. diperubahan APBD ini menyesuaikan target dengan capaian. PK sudah di tanda tangan tapi dari hasil Monev banyak kendala mungkin bagian Perencanaan dan keuangan bisa memfasilitasi.

c. Tanggapan Bapak Willy Brordus Lasah, S.E. selaku Plt. Asisten Administrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Di bagian hukum permasalahan di target dan capaian melebihi dari target dan persentasenya diatas 100%. Perubahan target itu dimungkinkan dalam tahun anggaran berjalan yaitu pada perubahan APBD ini juga berdampak pada perubahan Perjanjian Kinerja.

**12. Paparan Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA**

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi	Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	Target Akhir Renstra			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr1	Tr2	Tr3	Tr4					Target 2029	Kemajuan	Target			Realisasi s/d Juni
4.01.03.2.01	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,00	-	0	100	0,00	248.371.000	101.618.725	40,91	-40,91	EKBANG SDA
03.2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	JmWvXrk	4	10,00	81.133.500	25.094.125	30,93	19,07	EKBANG SDA
03.2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	z264tCH7g	0	10,00	74.841.000	31.368.200	41,91	8,09	EKBANG SDA
03.2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	0	5	0,00	29.912.000	14.338.700	47,94	-47,94	EKBANG SDA
03.2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	0	0,00	-	1	5	0,00	29.492.500	15.747.600	53,40	-53,40	EKBANG SDA
03.2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	2	5	0,00	32.992.000	15.070.100	45,68	-45,68	EKBANG SDA
4.01.03.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,00	-	0	100	0,00	115.564.300	40.799.800	35,30	-35,30	EKBANG SDA
03.2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	4	5	0,00	29.173.500	9.486.200	32,52	-32,52	EKBANG SDA
03.2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	Lap	0	0	0	0	0,00	-	4	5	0,00	32.957.000	12.908.400	39,17	-39,17	EKBANG SDA
03.2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	Lap	0	0	0	0	0,00	-	100	5	0,00	53.433.800	18.405.200	34,44	-34,44	EKBANG SDA
4.01.03.2.04	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti	100	%	0	0	0	0	0,00	-	100	100	0,00	84.648.600	46.844.100	55,34	-55,34	EKBANG SDA
03.2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	0	5	0,00	29.492.000	14.604.800	49,52	-49,52	EKBANG SDA
03.2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	0	5	0,00	29.491.800	15.842.800	53,72	-53,72	EKBANG SDA
03.2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	Dok	0	0	0	0	0,00	-	0	5	0,00	25.664.800	16.396.500	63,89	-63,89	EKBANG SDA

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH> 2025

Kinerja Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyampaian Budi Prasetyo, S.T., M.M. selaku Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA pada Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA

Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan SDA memaparkan bahwa untuk tabel yang masih berwarna kuning (tidak mencapai target) untuk TW II masih 50% dikarenakan laporan di upload di akhir tahun pada bulan November atau Desember pada realisasi semua kegiatan sudah terealisasi.

**13. Paparan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Hasil pengukuran kinerja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 dapat ditampilkan pada tabel, sebagai berikut :

**Hasil Pengukuran Kinerja**

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan III	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2023	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
01.03.2.03	Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/Seleksi dan e-purchasing	100	%	14	22	3	0	37,8	37,84	VCOxK	0	100	37,84	1.134.056.900	725.894.248	64,01	89,20	PBJ
2.03.ind2		Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik	70	guna La	55	88	45	0	188,0	268,57	ITTePa	50	400	47,00					
2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	74	Dok	10	16	2	0	28,0	37,84	VCOxK	544	364	7,69	709.940.000	482.037.182	67,90	-30,06	PBJ
2.03.0002	Terkelolanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	guna La	55	88	45	0	188,0	268,57	ITTePa	78	400	47,00	269.055.200	177.509.266	65,98	202,60	PBJ
2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	Orang	15	20	5	0	40,0	80,00	NONKE	0	340	11,76	155.061.700	66.347.800	42,79	37,21	PBJ

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH 2025>

Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan tabel dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyampaian oleh Bapak Wahyudi, S.IP., M.AP. selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pada indikator kinerja Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik terdapat melebihi dari target rencana 70 Pengguna Layanan sampai dengan Triwulan III Realisasi mencapai 188 Pengguna Layanan atau 268,57%. Capaian ini melebihi target disebabkan tingginya penerima layanan dari Penyedia dan Non Penyedia untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- Inputan RUP di Aplikasi Sirup LKPP-RI dari proses perpanjangan Akun sampai proses diumumkan paket.
- Update Akun Penyedia dan Non Penyedia di SPSE Inaproc.
- Sinkronisasi Data SIKAP Penyedia
- Proses E-Purchasing melalui Ekatalog Inaproc Versi 6 mulai dari pendaftaran Akun sampai tata cara belanja di sistem.

Realisasi Tender/Seleksi Triwulan III terdapat 2 (dua) Paket Tender Pekerjaan Konstruksi yang sudah selesai sampai dengan SPPBJ dan Penandatanganan Kontrak. Berdasarkan Indikator Kinerja Persentase capaian layanan pengadaan barang/jasa dengan Metode Pemilihan Tender/Seleksi dan E-Purchasing sampai dengan Triwulan III terealisasi 28 paket atau 37,84%. Tidak tercapainya target yang terealisasi pada tender/Seleksi dan E-purchasing disebabkan efisiensi Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sehingga ada pekerjaan yang direncanakan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi menjadi tidak dilaksanakan.

- b. Pertanyaan Bapak Willy Brordus Lasah, S.E. selaku Plt. Asisten Administrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Untuk penerima layanan PBJ tentu dari target tahun sebelumnya seperti apa, tahun ini seolah-olah terjadi lonjakan pengguna layanan ini sementara lonjakan dipengaruhi oleh perubahan sistem. Untuk penerima layanan ini apakah berdasarkan pengalaman dari PBJ selama ini sebelum adanya penyesuaian. apakah setiap tahun peningkatannya secara signifikan ?
- c. Tanggapan oleh Bapak Wahyudi, S.IP., M.AP. selaku Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa  
Tidak signifikan karena ada perubahan aplikasi versi 5 ke versi 6.
- d. Tanggapan Ibu Triwati, S.P., M.Si. selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Seperti terlihat pada tabel sudah overtarget sampai 198 di TW III mau tidak mau harus menyesuaikan sampai di akhir tahun kira-kira ada penambahan berapa yang penting masuk akal dan bisa tercapai. Target seandainya 198 mungkin tahun depan karena efisiensi atau kita tetap menggunkan angka yang ada supaya tidak merah. Target tahun ini tentu menjadi dasar target tahun depan. Mohon Bagian Organisasi diperjelas bagaimana terhadap menetapkan target tahun ini. E-catalog versi 6 baru disosialisasi sekarang, bagaimana untuk target kedepannya, jika ada perubahan kita ubah di perubahan.
- e. Tanggapan Bapak Gita Suryana, S.E.,M.A.P selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Menanggapi dari PBJ sebenarnya pertama yang harus dipedomani dalam menetapkan sebuah Perencanaan adalah baseline ketika kita menetapkan Perencanaan tahun 2025 tentu capaian kinerja tahun 2024. Harusnya trend capaian kinerja ada peningkatan, harusnya baseline 2024 misalnya 70 kita tetapkan di 2025 minimal 70 ketika seiring waktu berjalan banyak hal-hal teknis strategis yang tiba-tiba mempengaruhi capaian kinerja contohnya kita bisa melihat pada Triwulan I bagian PBJ sudah bisa mencapai 55, Pengguna Layanan Triwulan II 88, Triwulan III 45. Trend capaian per triwulan itu menjadi rujukan untuk tahun yang akan datang. Ketika target Triwulan III sudah 188 dan capaian kinerja 268,57 % perlu dilakukan perubahan baseline kita adalah capaian sampai dengan TW terakhir. Membuat analisa dengan trend capaian TW I sampai TW III kira-kira apakah ada penambahan atau tidak dan ini perlu disepakati. Baseline nya sampai dengan TW III 188 menjadi target kinerja di perubahan. Untuk tahun 2026 seharusnya yang menjadi baseline adalah capaian tahun 2025. Di laporan dibuat analisisnya.

#### 14. Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil paparan diatas maka dibuat matriks rencana aksi tindaklanjut sebagai berikut;

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Realisasi
1	Faktor-faktor capaian antara lain : a. Terjadi Masa Transisi Katalog Elektronik Versi 5 ke Versi 6 sehingga banyak pengguna verifikasi ulang Akun yang bersangkutan b. Perpanjangan akun non penyedia PPK dan PP Tahun 2025 Setelah di non aktif secara otomatis oleh sistem per 31 Desember 2024 c. Perubahan Domain website <a href="https://lpse.kapuashulukab.go.id/">https://lpse.kapuashulukab.go.id/</a> menjadi <a href="https://spse.inaproc.id/kapuashulukab/">https://spse.inaproc.id/kapuashulukab/</a> sehingga semua Akun Pengguna LPSE di non aktifkan oleh sistem, jika ingin mengaktifkan lagi yang bersangkutan harus verifikasi ulang data yang bersangkutan dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan Tim LPSE kabupaten Kapuas Hulu d. Banyak Pengguna LPSE memerlukan pendampingan dalam Inputan RUP dan pembuatan Akun Katalog Inaproc e. Banyak Pengguna LPSE mengalali masalah berkenan Akses Akun yang bersangkutan dan masalah terkait transaksi proses belanja pada Katalog Versi 6	akan melakukan perubahan target. (210) di laporan dibuat analisa trend	Telah melakukan penyesuaian target Kinerja dengan menggunakan analisis
2	Rekon dilaksanakan setiap triwulan bersama BKAD, namun proses finalisasi di BKAD utk penandatanganan, sampai degna Tr 3 belum menerima data finaal dari BKAD		
3	Nihil	diberi tenggat waktu	
4	sedang dalam proses, SK sudah dinaikkan ke bagian Hukum masih dalam proses perbaikan dan Harmonisasi. (Laporan Akhir Tahun)		
5	sedang dalam proses, mengambil data di lapangan dimasukkan diaplikasi SINAR dan diverifikasi oleh BIG (Laporan Akhir Tahun)		
6	Berdasarkan Perbup belum disampaikan, sehingga sampai akhir tahun bisa terealisasi 0 (Target 3 Segmen)	Berkoordinasi ke Bagian Hukum	
7	Belum terlaksana 1 Kebijakan Bansos yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, sedang dalam proses pengajuaan Telaahan Staf (Draf SK)	SK Bupati akan dilaksanakan pada TW 4	

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi
		(Oktober, Minggu ketiga)	
8	Merupakan Laporan Akhir Tahun. Sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan	Akan diupload pada November atau Desember	
9	Penentuan Batas agak sedikit Rumit, byk proses yg kita laksanakan, Sibus dan Ariun mendalam sudah 4 5 kali kelapangan, berubah terus dengan berbagai alasan, sehingga segmen lama tersampaikan.		
10	Sudah masuk daraf sembilan kerjasama, kemungkinan akan melebihi target (Pkerja migran)	Akan melakukan perubahan target	telah melakukan perubahan target kinerja
11	Perubshan dinamis aturan. berdasarakan telaahan OPD menjadi Perbup SOTK. Kominfo skornya msih kurang penetapan urusan. Kendalanya target yang awalnya 2 PD disesuaikan menjadi 1 PD	Menyesuaikan Target	telah melakukan perubahan target kinerja
12	Sedang berproses pembuatan SK		
13	Ternyata grand dan roadmap belum selesai	akan kita sesuaikan menjadi 6 PD	Telah menyesuaikan target kinerja pada PK

**15. Tindak Lanjut terhadap Hasil Evaluasi pada LKJIP 2024**

Berikut ini adalah tabel permasalahan pada tahun 2024:

No	Rekomendasi (LKJIP)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi		Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
			Uraian	Link Evidence		
<b>Indikator: Predikat SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu</b>						
1	Melakukan penilaian Mandiri AKIP dengan melibatkan tim SAKIP dan Pimpinan	Melakukan Penilaian Mandiri AKIP 2025	Telah melakukan Penilaian Mandiri AKIP 2025	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCblALLRkCyWXej8siklXpSUUYxoo1/edit?usp=drive_link&amp;oid=111257379217049592474&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NCblALLRkCyWXej8siklXpSUUYxoo1/edit?usp=drive_link&amp;oid=111257379217049592474&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>	Kabag Perkeu	Selesai
2	Membagi tugas agar renja disusun tepat waktu	Membagi Tugas dan membuat Scedule	Telah membuat Tim SAKIP Perkeu	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IU">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IU</a>	Kabag Perkeu	Selesai

No	Rekomendasi (LKjIP)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi		Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
			Uraian	Link Evidence		
				<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=796258060#gid=796258060">RHsU/edit?gid=796258060#gid=796258060</a>		
3	Memperbaiki dinamika penyusunan RENJA					Proses
4	Mengumpulkan dan memverifikasi data dukung seluruh indikator (IKI)	Mengumpulkan dan memverifikasi data dukung seluruh indikator (IKI)	Telah melakukan Pengumpulan Data dan Verifikasi Data Dukung	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=1782659149#gid=1782659149">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=1782659149#gid=1782659149</a>	Kabag Perkeu	Selesai
5	Melakukan evaluasi internal pada setiap bagian	Menyurati setiap bagian agar melakukan Rapat Evaluasi Internal Bagian serta mendokumentasikannya	Seluruh bagian telah melakukan Rapat Evaluasi Internal	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=831744978#gid=831744978">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=831744978#gid=831744978</a>	Seluruh Bagian	Selesai
6	Mempelajari secara mendalam terkait aturan baru	Mempelajari secara continue setiap aturan	Akan dilakukan sepanjang Tahun	-	Seluruh Bagian	Proses
7	Berdiskusi dengan seluruh tim tentang aturan terbaru	Berdiskusi dalam rapat internal setiap triwulan	Diskusi dalam Rapat Internal	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1DM-lkn-RL5NzUbHIMqMAJYH9kwUrB7en?usp=drive_link">https://drive.google.com/drive/folders/1DM-lkn-RL5NzUbHIMqMAJYH9kwUrB7en?usp=drive_link</a>	Seluruh Bagian	Proses
8	Menyusun jadwal pengukuran kinerja dan Monev Kinerja	Menyurati setiap bagian dengan tenggat batas waktu	Telah menyampaikan surat Pengukuran Kinerja dengan tenggat waktu	<a href="https://drive.google.com/file/d/1BEq26UJt8_T1PnOEN8d8l6Vlpm1fAa8h/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1BEq26UJt8_T1PnOEN8d8l6Vlpm1fAa8h/view?usp=drive_link</a>	Kabag Perkeu	Selesai
9	Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja	Menggunakan Spreadsheet	Seluruh Bagian Telah Menggunakan Spreadsh	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=1782659149#gid=1782659149">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEmSX8GtZlr4Psc5KXxjNd0lt-W2edNWu7ET8IURHsU/edit?gid=1782659149#gid=1782659149</a>	Seluruh Bagian	Selesai

No	Rekomendasi (LKjIP)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi		Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
			Uraian	Link Evidence		
			eeet dalam pengisian data kinerja	<a href="RHsU/edit?gid=316238161#gid=316238161">RHsU/edit?gid=316238161#gid=316238161</a>		
10	Mempublikasikan dokumen renja sebelum akhir triwulan I	Akan Upload Renja 2026 paling lambat Tw I	Telah Upload Renja 2026 pada Bulan Desember 2025	<a href="https://ppid.kapuasahulukab.go.id/frontend/dokumen/detail/300425629">https://ppid.kapuasahulukab.go.id/frontend/dokumen/detail/300425629</a>	Kabag Perkeu	Selesai
<b>Indikator: Nilai LPPD Kabupaten Kapuas Hulu</b>						
11	Melaksanakan koordinasi yang intensif dengan penyusun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah se Kabupaten Kapuas Hulu	Akan mengikuti pembinaan dalam penyusunan Ranwal RENSTRA/ RPJMD	Telah mengikuti tata cara pengisian IKD/ IKK pada aplikasi e-Renstra. telah ditetapkan pula bahwa IKD ambil dari Indikator Program	-	Kabag Perkeu	Selesai
12	Mengevaluasi ketersediaan Anggaran yang mendukung tercapainya indikator - indikator dalam IKK	Mengevaluasi ketersediaan Anggaran yang mendukung tercapainya indikator - indikator dalam IKK	-	-	Kabag Tapem	Tidak Selesai
13	Memberikan asistensi kepada perangkat Daerah melalui Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pencermatan terhadap data	Akan melakukan asistensi penyusunan LPPD	Telah dilakukan asistensi penyusunan LPPD diikuti oleh seluruh OPD/ Kecamatan	-	Kabag Tapem	Selesai

No	Rekomendasi (LKjIP)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi		Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
			Uraian	Link Evidence		
	IKK beserta bukti dukungnya sehingga dapat menyajikan data-data yang valid dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu					
<b>Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah</b>						
14	Melakukan penggantian sarana prasarana atau peralatan yang rusak atau usang secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dalam rangka meningkatkan kenyamanan pengguna layanan	Perbaikan sarana prasarana pelayanan publik	Pindah Kantor baru (SATAP)	-	Kabag Perkeu	Tidak Selesai
15	Menangani dengan cepat setiap pengaduan yang ada untuk segera ditindaklanjuti	Membuat Rekapitulasi aduan serta tindaklanjutnya		-	Kabag Perkeu	Proses
16	Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang memberikan layanan dengan melaksanakan Bimtek atau Pelatihan	Melaksanakan Bimtek/ Pelatihan	Tidak ada anggaran	-	Kabag Perkeu	Tidak Selesai
17	Membuat standar Prosedur Operasional untuk setiap layanan publik yang ada di	Membuat SOP Pelayanan Publik		-	Kabag Perkeu	Tidak Selesai

No	Rekomendasi (LKjIP)	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi		Penanggung jawab	Status/ Progress Penyelesaian
			Uraian	Link Evidence		
	lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu					

#### 16. Matriks Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan sebelumnya (Triwulan I)

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Realisasi	Progres Penyelesaian
1	Tidak adanya bukti evidence pada bagian Kesra, karena memang SK dalam proses pembuatan	Membuat dan mengupload bukti dukung	SK masih dalam proses tanda tangan Bupati	Selesai
2	Hibah tidak bisa menjadi target pada Kesra	Tidak menggunakan jumlah hibah, tetapi menggunakan indikator lainnya	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kebijakan Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Selesai
3	Target utk pengendalian dan distribusi akan diubah menjadi 1 dok, berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 2024	menyesuaikan target pada Perjanjian Kinerja	menyesuaikan target pada Perjanjian Kinerja	Selesai
4	Seluruh Indikator berdasarkan hasil rapat tim target akan diubah menjadi 4 dokumen setiap triwulan. melakukan koordinasi , evaluasi kebijakan	menyesuaikan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja	menyesuaikan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja	Selesai
5	Terdapat beberapa indikator yg tidak terakomodir dalam nomenklatur kegiatan	Menyesuaikan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA		Selesai
6	Dana DAK terdampak efisiensi	Menyesuaikan Target sesuai dengan Anggaran yg tersedia	merubah target dan disesuaikan dengan kenyataan yang ada di lapangan agar terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan	Selesai
7	Beberapa OPD tidak/ belum melaksanakan Paket Tender		Tidak tercapainya target yang terealisasi pada tender/seleksi dan	Selesai

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Realisasi	Progres Penyelesaian
			E-purchasing disebabkan efisiensi Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 sehingga ada pekerjaan yang direncanakan melalui metode pemilihan Tender/Seleksi menjadi tidak dilaksanakan.	
8	permasalahan pelaksanaan akun terjadi tingkat layanan dari LPSE	Membuat Rekap, Dokumentasi dan absensi		Selesai
9	Perubahan e-Catalog v.5 ke v.6	ke UPBJ melakukan Bimtek	Sudah melakukan Bimtek online/zoom	Selesai
10	terkait efisiensi sehingga utk UKPBJ akan dilakukan perubahan target	melakukan perubahan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja dan Renstra	Akan melakukan perubahan target dan indikator pada Perjanjian Kinerja dan Renstra	Selesai
11	Tidak ada bukti dukung	memberikan bukti dukung		Selesai
12	Target utk disiplin pegawai kegiatan senam. yg diupload SPJ atau Foto senamnya	Upload laporan dengan menyertakan fotonya		Selesai
13	Ada perubahan terhadap indikator yang berubah setelah ada hasil evaluasi kami	melakukan perubahan indikator dan target pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah Revisi PK dan RENSTRA	Selesai
14	Untuk anjab itu menggunakan dokumen bukan PD	melakukan perubahan terkait target pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah melakukan revisi	Selesai
15	Perda sampai saat ini masih dalam tahap proses di provinsi	Menunggu proses penetapan perda pada provinsi	Terkait Perda untuk penetapannya sudah selesai tinggal menunggu untuk tanggal penetapan	Selesai
16	Anjab yang sudah di verifikasi 54 PD, 27 PD Kabupaten, 23 PD Kecamatan dan 4 Kelurahan. yang mendekati format anjab	melakukan perubahan terhadap indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja dan RENSTRA	Sudah merevisi PK dan RENSTRA	Selesai

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Realisasi	Progres Penyelesaian
	baru 41 PD, yg sesuai isi baru 5 PD (Dinamika perubahan peraturan sangat cepat sekali, sehingga perlu selalu melakukan perbaikan berkala sesuai peraturan)			
17	berdasarkan hasil efiseinsi akan mengalami penurunan target dan satuannya	Target disesuaikan dengan anggaran yang ada	Sudah melakukan Perubahan PK dan Renstra	Selesai
18	Nilai LPPD dikeluarkan terakhir 2022	Laporan LPPD Kabupaten 1 dokumen	Indikator sudah menggunakan Persentase Jumlah OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk pada PK Kabag	Selesai
19	Kerjasama apakah evidence nya di masukkan semua atau tidak (kerjasama dan PKS)	dimasukan kedua duanya		Selesai
20	Target terdapat yang 4,5 dokumen	menyessuaikan terhadap target yang 90%, agar tepat mendapat angka 5 kerjasama atau melakukan pembulatan	Membulatkan	Selesai
21	Terdapat efisiensi anggaran, sehingga target produk hukum mengalami penurunan target	Menargetkan sebanyak 450 produk hukum yg disusun	Telah melakukan perubahan target	Selesai
22	Beberapa Bagian belum melaksanakan rapat evaluasi pada masing-masing bagian secara triwulan	Seluruh bagian mengadakan rapat evaluasi masing-masing bagian	Baru hanya Tapem dan Hukum	Selesai

**17. Matriks Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan sebelumnya (Triwulan II )**

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Realisasi	Progres Penyelesaian
1	terdapat 17 Kebijakan	perbaikan terhadap target kinerja	Sudah dilaksanakan	Selesai
2	terdapat 8 kebijakan, tahapan 1 belum terselesaikan	perbaikan terhadap target kinerja	Sudah dilaksanakan	Selesai

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjut	Realisasi	Progres Penyelesaian
3	hanya 1 sk, saja. biasanya di ajukan pada akhir tahun	revisi target	Sudah dilaksanakan	Selesai
4	Dampak DAK efiseinsi sehingga tidak tercapai 74 dok	akan terealisasi 18 dok saja smpai akhir tahun, Revisi target	terealisasi 29 paket	Selesai
5	terlewatkan terisi utuk triwulan I	akan disii menjadi 14 pda tr 1	Sudah dilaksanakan	Selesai
6	Kabag tidak dapat hadir saat rapat krn ada kegiatan di DPRD, staf terkait yg memahami juga tidak hadir, yg mnghadiri bukan org yg trlibat langsung dalam SAKIP	akan melakukan rapat internal dan hasilnya akan disampaikan kepada Bagian Perkeu	Proses	Selesai
7	sedang dalam proses penetapan perbup penyusunan SOTK		Perbup sedang berproses untuk ditetapkan	Selesai
8	telah melakukan pendampingan, terdampak terkait regulasi baru kepmenpan	agustus akan melakukan penetapan anjab	telah dilaksanakan pendampingan penyusunan Peta Jabatan sesuai hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu	Selesai
9	Pada Bagian Prokopim tidak terdapat penyusunan produk kebijakan	Mengidentifikasi ketersediaan penyusunan produk hukum, jika tidak teridentifikasi maka indikator akan dihapus		Selesai
10		terus mendorong setiap OPD agar akipnya B	telah melakukan pendampingan Asistensi Dokumen Perencanaan terhadap 10 Perangkat Daerah Pendampingan dilakukan berdasarkan surat Nomor 000.8.6.3/4014/SETDA/ORG tanggal 29 Oktober 2025 tentang Pendampingan Implementasi AKIP Perangkat Daerah	Selesai
11	pada bagian hukum tidak ada produk hukum, yg mengisi asisten Pem Kes	tidak di tampilkan atau indikator dihapus	sudah dihapus	Selesai

No	Permasalahan	Rencana Aksi Tindaklanjuti	Realisasi	Progres Penyelesaian
	(sama seperti prokopim)			
12	Terkaial Tekon sudah dirumahkan, sehingga penurunan realisasi	memberdayakan staf yang ada	telah adanya CPNS baru yang handle pemublikasian produk hukum	Selesai
13	DPA Pergeseran tidak termasuk DPA Perubahan	melakukan perubahan target terhadap DPA Perubahan menjadi 1 target	sudah menyesuaikan	Selesai

Sebagai tindaklanjuti dari rapat Monitoring Evaluasi kinerja berdasarkan evaluasi capaian kinerja triwulan III diharapkan untuk setiap kegiatan pada triwulan berikutnya bisa dilaksanakan sesuai target dan rencana sehingga pencapaian realisasi kinerja bisa lebih baik dan meningkat.

Demikian Rapat Evaluasi ini dilakukan dan telah disepakati bersama untuk segera ditindaklanjuti.

Pimpinan Rapat,



Willy Brordus Lasah, S.E.  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19760518 200701 1 021






PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397  
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : SELASA, 14 OKTOBER 2025  
Pukul : 08:30 WIB  
Tempat : RUANG RAPAT BUPATI KAPUAS HULU  
Agenda : RAPAT MONITORING & EVALUASI KINERJA TRIWULAN III  
TAHUN 2025 SETDA KAB. KAPUAS HULU

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Willy Brodus Lasah, SE	Pt. Asisten APUM	1	2
2	P. TEDDY HINGGAN	Kabag. PERKEU		
3	Triwani	As. Kel. B. G	3	4
4	Hermanus .S	Kabes Tapen		
5	Hias (Cin. sm)	Kabag. Kesm	5	6
6	Nicholas Purwanfo	Anal. kebijakan ahli mada		
7	Adrianus Irawantoto	Perencana Ahli Pertama	7	8
8	Alberto Des	Staf Pooker		
9	Maulraa	Anal. kebijakan ahlimuda	9	10
10	Isnaini .D. P	Anal. kebijakan Ahli muda Bag. Organisasi		
11	Rahma Junat	Per. Per-uu Ahli muda	11	12
12	Hendambus Hw	Per. Per-uu Ahli pertam		
13	Sentot Dwi Prayogi	anal. kebijakan ahlimuda Bagian Prokepin	13	14
14	A. Welly. A	Anal. kebijakan ahli Pertama Bag. Umum		
15	Febry .H	Anal. kebijakan Ahli Pertama Tapem	15	16
16	BATHARI SURORA	Anal. kebijakan Ahli pertam		
17	Sumiat	Penelaah teknis kebijakan	17	18
18	Monica L. D.	Penelaah teknis kebijakan		
19	YUDI PRATAMA.H.	Staf	19	20
20	Tommy Ismayedi	Anal. kebijakan Ahli Pertama		

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
21	Erlina Kati	STAF PISJ	21 	22
22	Wahyudi	Kasubbag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa		
23	Maintawati	Pengolah Data Eksternal	23 	24
24				
25			25	26
26				
27			27	28
28				
29			29	30
30				
31			31	32
32				
33			33	34
34				
35			35	36
36				
37			37	38
38				
39			39	40
40				
41			41	42
42				
43			43	44
44				
45			45	46
46				

## Monitoring dan Evaluasi Kinerja TW III Tahun 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716,  
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397  
Laman: <http://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: [setda@kapuashulukab.go.id](mailto:setda@kapuashulukab.go.id)

Putussibau, 10 Oktober 2025

Nomor : 700.1.2.71/369 /SETDA/PERKEU  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (Dua) Dokumen  
Hal : Rapat Monitoring & Evaluasi Kinerja  
Triwulan III Tahun 2025

Yth. Daftar Terlampir  
di  
Putussibau

Dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan Evaluasi Kinerja Triwulan III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Oktober 2025  
Waktu : 08.30 WIB-selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bupati  
Acara : Rapat Monitoring & Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025

Adapun yang menjadi Bahan Evaluasi dapat dilihat pada Link: <https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-2025-SetdaKH> pada Triwulan III (terlampir). Diharapkan seluruh Kepala Bagian menyiapkan tanggapan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut. Yang tidak mencapai target serta yang melebihi target ditandai dengan warna kuning dan warna merah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



P. Sekretaris Daerah,

Agustinus Stormandi

Lampiran I Surat Sekretaris Daerah  
Nomor : 700.1.2.7/3679/SETDA/PERKEU  
Tanggal : 10 Oktober 2025

#### DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
7. Kepala Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
8. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
9. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
10. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
11. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
12. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu



## **MONITORING KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2025**

<https://bit.ly/Monitoring-Kinerja>

### **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716

Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

<https://setda.kapuashulukab.go.id/>



**TAHUN 2025**



**PENGUKURAN KINERJA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
 TRIWULAN III TAHUN 2025**

Sumber: <https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-2025-SetdaKH>

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>										<b>RATA-RATA</b>	<b>63,38</b>	<b>RATA-RATA/ TOTAL</b>	<b>27,13</b>	<b>109.910.889.604</b>	<b>72.468.021.897</b>	<b>65,93</b>	<b>-2,56</b>	<b>-</b>	
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis dibidang Pemerintahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	0	67	0	0	66,7	70,18	<a href="#">WVXVr3E</a>	82,97	100	66,67	54.837.811.229	41.588.194.154	75,84	5,69	Sekretaris Daerah
ran 1.ind2		Persentase kebijakan strategis dibidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	95	%	47	35	6	0	88,24	92,88	<a href="#">WVXVr3E</a>	100	95	92,88					
4.01.02	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Strategis di bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	20	Kbjkn	8	8	1	0	17,0	85,00	<a href="#">WVXVr3E</a>	0	96	17,71	54.837.811.229	41.588.194.154	75,84	9,16	Asistem Pem Kesra
01.02.2.01	Meningkatnya jumlah wilayah yang mengalami penegasan batas wilayah, pengenalan dan perekaman toponimi (alam, buatan, dan budaya)	Persentase peningkatan penyelesaian administrasi batas antar wilayah Kecamatan dan Kelurahan	68	%	0	69	0	0	69,4	102,12	<a href="#">Feer_l27</a>	0	72	96,45	540.318.500	363.194.658	67,22	31,74	TAPEM
01.02.2.01.ind2		Persentase Peningkatan Pemutakhiran Data Rupabumi Kecamatan	78	%	0	0	74	0	73,9	94,76	<a href="#">_9NhRJE</a>	0	90	82,13					TAPEM
01.02.2.01.ind3		Persentase Jumlah Urusan pada OPD yang Menyusun LPPD sesuai petunjuk	100	%	100	0	0	0	100,0	100,00	<a href="#">W0icx9z</a>	0	100	100,00					TAPEM
02.01.0001	Terfasilitasinya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	139.892.500	82.551.008	59,01	-59,01	TAPEM
02.01.0002	Terfasilitasinya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	138.997.000	46.743.300	33,63	-33,63	TAPEM
02.01.0003	Terfasilitasinya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2	Dok	1	1	0	0	2,0	100,00	<a href="#">znZM_hN</a>	1	10	20,00	261.429.000	233.900.350	89,47	10,53	TAPEM
01.02.2.02	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kebijakan dibidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	12	Kebijaka	7	4	0	0	11,0	91,67	<a href="#">9H1G_6</a>	0	56	19,64	53.770.150.459	40.941.221.402	76,14	-12,25	KESRA
01.02.2.02.ind2		Jumlah rumusan Kebijakan terkait Kesejahteraan Sosial yang terlaksana	1	Kebijaka	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00					KESRA
01.02.2.02.ind3		Jumlah Rumusan Kebijakan Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana	4	Kebijaka	1	2	1	0	4,0	100,00	<a href="#">CgEIkTE</a>	0	20	20,00					KESRA
02.02.0001	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Dok	0	1	1	1	3,0	100,00	<a href="#">JviWQg5</a>	325	15	20,00	53.379.886.259	40.719.760.229	76,28	23,72	KESRA
02.02.0002	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkaiat Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1	Dok	0	1	0	0	1,0	100,00	<a href="#">rr15srZZy</a>	101	5	20,00	207.507.200	109.225.468	52,64	47,36	KESRA
02.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkaiat Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	3	Dok	1	1	1	0	3,0	100,00	<a href="#">Gpzo1Jg</a>	2	15	20,00	182.757.000	112.235.705	61,41	38,59	KESRA
01.02.2.03	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, kebutuhan masyarakat, dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase penyelesaian Proses Penyusunan produk hukum	82	%	27	27	34	0	87,8	107,10	<a href="#">ars/10LV</a>	82,125	90	97,58	393.614.270	232.275.494	59,01	69,17	HUKUM
01.02.2.03.ind2		Persentase Fasilitasi Bantuan Hukum	77	%	46	0	31	0	76,9	99,90	<a href="#">ars/10LV</a>	86,67	90	85,47					HUKUM
01.02.2.03.ind3		Persentase Publikasi dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	70	%	16	66	43	0	124,3	177,55	<a href="#">s/10LVA3</a>	50	90	138,10					HUKUM
02.03.0001	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	450	Dok	147	150	186	0	483,0	107,33	<a href="#">rs/10LVA</a>	618	3230	14,95	177.329.170	122.239.208	68,93	38,40	HUKUM
02.03.0002	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	13	Kasus	6	0	4	0	10,0	76,92	<a href="#">rs/10LVA</a>	10	53	18,87	120.010.000	75.075.300	62,56	14,37	HUKUM



Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
2.03.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	70	Produk Hu	11	46	30	0	87,0	124,29	rs/10LVA	21	146	59,59	96.275.100	34.960.986	36,31	87,97	HUKUM
01.02.2.04	<b>Meningkatnya kuantitas dan kualitas kerjasama Daerah</b>	<b>Persentase Kerjasama Wajib Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>85,7</b>	<b>85,71</b>	<b>/MQQ 7b</b>	<b>91,3</b>	<b>100</b>	<b>85,71</b>	<b>133.728.000</b>	<b>51.502.600</b>	<b>38,51</b>	<b>47,20</b>	<b>TAPEM</b>
2.04.0001	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	7	Dok	0	3	3	0	6,0	85,71	/MQQ 7b	0	41	14,63	133.728.000	51.502.600	38,51	47,20	TAPEM
Sasaran 2	<b>Meningkatnya Kualitas Kebijakan diBidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Persentase kebijakan strategis dibidang Perekonomian dan SDA yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21,1</b>	<b>21,05</b>	<b>ayXVr3E</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>21,05</b>	<b>1.652.600.800</b>	<b>1.098.991.123</b>	<b>66,50</b>	<b>-45,45</b>	<b>Sekretaris Daerah</b>
4.01.03	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan dibidang Perekonomian, Pembangunan dan SDA</b>	<b>Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Perekonomian, Pembangunan, SDA dan PBJ yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan</b>	<b>19</b>	<b>Dok</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4,0</b>	<b>21,05</b>	<b>ayXVr3E</b>	<b>0</b>	<b>95</b>	<b>4,21</b>	<b>1.652.600.800</b>	<b>1.098.991.123</b>	<b>66,50</b>	<b>-45,45</b>	<b>Asisten Ekbang</b>
01.03.2.01	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kebijakan dibidang Perekonomian</b>	<b>Persentase kebijakan perekonomian yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>318.331.000</b>	<b>189.888.025</b>	<b>59,65</b>	<b>-59,65</b>	<b>EKBANG SDA</b>
2.01.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	mWVnXr	4	10	10,00	143.889.500	57.520.725	39,98	10,02	EKBANG SDA
2.01.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2	Lap	0	1	0	0	1,0	50,00	Z6i4fCH7	0	10	10,00	77.301.000	55.787.600	72,17	-22,17	EKBANG SDA
2.01.0003	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	27.412.000	23.633.700	86,22	-86,22	EKBANG SDA
2.01.0004	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	29.492.500	26.398.100	89,51	-89,51	EKBANG SDA
2.01.0005	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	2	5	0,00	40.236.000	26.547.900	65,98	-65,98	EKBANG SDA
01.03.2.02	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase kebijakan Administrasi Pembangunan yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>115.564.300</b>	<b>106.137.550</b>	<b>91,84</b>	<b>-91,84</b>	<b>EKBANG SDA</b>
2.02.0001	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	29.173.500	25.429.900	87,17	-87,17	EKBANG SDA
2.02.0002	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi ProgramPembangunan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	4	5	0,00	32.957.000	32.065.100	97,29	-97,29	EKBANG SDA
2.02.0003	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	1	Lap	0	0	0	0	0,0	0,00	-	100	5	0,00	53.433.800	48.642.550	91,03	-91,03	EKBANG SDA
01.03.2.03	<b>Meningkatnya kualitas layanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase capaian layanan pengadaan barang dan jasa dengan metode pemilihan tender/Seleksi dan e-purchasing</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>37,8</b>	<b>37,84</b>	<b>/VCQxcIK</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>37,84</b>	<b>1.134.056.900</b>	<b>725.894.248</b>	<b>64,01</b>	<b>89,20</b>	<b>PBJ</b>
2.03.ind2		<b>Jumlah Penerima Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik</b>	<b>70</b>	<b>guna Lay</b>	<b>55</b>	<b>88</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>188,0</b>	<b>268,57</b>	<b>/N7TpPxu</b>	<b>50</b>	<b>400</b>	<b>47,00</b>					<b>PBJ</b>
2.03.0001	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	74	Dok	10	16	2	0	28,0	37,84	/VCQxcIK	544	364	7,69	709.940.000	482.037.182	67,90	-30,06	PBJ
2.03.0002	Terkelolanya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Jumlah Pengguna yang mendapatkan layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik	70	guna Lay	55	88	45	0	188,0	268,57	/N7TpPxu4	78	400	47,00	269.055.200	177.509.266	65,98	202,60	PBJ
2.03.0003	Terlaksananya Advokasi dan Penangan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	Orang	15	20	5	0	40,0	80,00	/lbN0rKEg	0	340	11,76	155.061.700	66.347.800	42,79	37,21	PBJ
01.03.2.04	<b>Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Persentase rekomendasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang di tindaklanjuti</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>84.648.600</b>	<b>77.071.300</b>	<b>91,05</b>	<b>-91,05</b>	<b>EKBANG SDA</b>
2.04.0001	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.492.000	29.098.400	98,67	-98,67	EKBANG SDA
2.04.0002	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan, Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	29.491.800	24.945.600	84,58	-84,58	EKBANG SDA
2.04.0003	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	5	0,00	25.664.800	23.027.300	89,72	-89,72	EKBANG SDA

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab	
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%			
Sasaran 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Predikat SAKIP Sekretariat Daerah	67,5	Nilai	60	60	68	0	67,5	100,00	0W7m3B	60,4	79	85,44						Sekretaris Daerah
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dibidang Administrasi Umum	Persentase kebijakan strategis dibidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	100	%	10	0	2	0	12,2	12,20	ayXVr3E	0	100	71,43	53.420.477.575	29.780.836.620	55,75	0,35	Sekretaris Daerah	
4.01.01	Meningkatnya kualitas kebijakan strategis di bidang administrasi umum	Jumlah Kebijakan Strategis di Bidang Administrasi Umum yang ditetapkan sesuai Peraturan Perundangan	41	Dok	4	0	1	0	5,0	12,20	ayXVr3E	0	151	3,31	53.420.477.575	29.780.836.620	55,75	-43,55	Asistem Adum	
01.01.2.01	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Perencanaan, dokumen Penganggaran dan Laporan Kinerja yang sesuai dengan pedoman teknis	100	%	46	15	31	0	92,3	92,31	ayXVr3E	91,89	100	92,31	546.415.500	313.902.800	57,45	34,86	Perkeu	
2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dok	2	1	1	0	4,0	100,00	vXVr3EZ	2	20	20,00	313.353.500	277.156.300	88,45	11,55	Perkeu	
2.01.0002	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	kmO-xl3U	1	5	20,00	19.872.000	4.812.500	24,22	75,78	Perkeu	
2.01.0003	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1,0	100,00	PDOHM3	1	5	20,00	14.918.000	2.664.000	17,86	82,14	Perkeu	
2.01.0004	Tersedianya Dokumen DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	ssJITZH	1	5	20,00	15.682.000	10.114.000	64,49	35,51	Perkeu	
2.01.0005	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1	Dok	0	0	1	0	1,0	100,00	FTESBw	1	5	20,00	8.038.000	3.394.000	42,22	57,78	Perkeu	
2.01.0006	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1,0	100,00	7VtJlavd	5	5	20,00	124.632.000	15.762.000	12,65	87,35	Perkeu	
2.01.0007	Terlaksananya Dokumen Evaluasi Sekretariat Daerah yang disusun	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	4	Lap	1	1	1	0	3,0	75,00	kn-RL5Nz	1	20	15,00	49.920.000	0	0,00	75,00	Perkeu	
2.01.0008	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Lap	0	1	0	0	1,0	100,00	8-sv883E	0	5	20,00	0	0	#####	#DIV/0!	Perkeu	
01.01.2.02	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan sesuai Pedoman yang Berlaku	100	%	30	24	21	0	75,8	75,76	ayXVr3E	0	100	75,76	17.781.368.480	11.435.592.831	64,31	11,45	Perkeu	
2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan Penerimaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bln	3	3	3	0	9,0	75,00	AulfW4S	0	60	15,00	16.463.656.480	10.512.766.531	63,85	11,15	Perkeu	
2.02.0002	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	1.360.000	0	0,00	0,00	Perkeu	
2.02.0003	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	1Ca7YeA	1	5	20,00	643.538.000	453.990.000	70,55	29,45	Perkeu	
2.02.0004	Tersedianya Laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD yang disusun	Jumlah Dokumen koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dok	3	3	3	0	9,0	75,00	AulfW4S	1	60	15,00	29.440.000	15.125.000	51,38	23,62	Perkeu	
2.02.0005	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	1	0	0	0	1,0	100,00	BEEfCKJ	1	5	20,00	17.224.000	1.350.000	7,84	92,16	Perkeu	
2.02.0006	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut pemeriksaan	1	Dok	0	1	0	0	1,0	100,00	proses	1	5	20,00	604.450.000	446.083.300	73,80	26,20	Perkeu	
2.02.0007	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Lap	1	1	1	0	3,0	75,00	AulfW4S	4	20	15,00	17.706.000	4.928.000	27,83	47,17	Perkeu	
2.02.0008	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dok	1	0	0	0	1,0	100,00	HyCqOu	1	5	20,00	3.994.000	1.350.000	33,80	66,20	Perkeu	
01.01.2.03	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	95	%	10	30	0	0	40,0	42,11	ayXVr3E	100	95	42,11	507.465.400	261.294.800	51,49	-9,38	Umum	
2.03.0001	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	ZJpWw4f	1	10	10,00	20.880.000	5.855.000	28,04	21,96	Umum	
2.03.0002	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	2	Dok	0	1	0	0	1,0	50,00	wwM1Q	1	10	10,00	14.600.000	2.479.000	16,98	33,02	Umum	
2.03.0003	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	Laporan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	98.698.300	40.133.900	40,66	-40,66	Umum	


Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
2.03.0005	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1	1	0	0	2,0	50,00	Tidak Ada	1	20	10,00	22.975.000	8.700.000	37,87	12,13	Umum
2.03.0006	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Daftar Barang Sekretariat Daerah yang dihasilkan	1	Laporan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	350.312.100	204.126.900	58,27	-58,27	Umum
<b>01.01.2.05</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian yang sesuai dengan pedoman berlaku</b>	<b>90</b>	<b>%</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,8</b>	<b>89,76</b>	<b>Tidak Ada</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>89,76</b>	<b>2.724.298.920</b>	<b>2.135.804.564</b>	<b>78,40</b>	<b>11,36</b>	<b>Umum</b>
2.05.0001	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	12	Bulan	3	3	3	0	9,0	75,00	WAaE_K	12	60	15,00	120.400.000	79.000.000	65,61	9,39	Umum
2.05.0002	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	5	0,00	150.000.000	149.124.060	99,42	-99,42	Umum
2.05.0003	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	12	Bln	3	3	3	0	9,0	75,00	h7SPyz	12	60	15,00	2.208.181.920	1.897.460.504	85,93	-10,93	Umum
2.05.0004	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	60	0,00	99.815.000	4.420.000	4,43	-4,43	Umum
2.05.0005	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Bln	0	0	0	0	0,0	0,00	y6 PMzb	0	60	0,00	43.230.000	5.800.000	13,42	-13,42	Umum
2.05.0009	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	0	0	0	0	0,0	0,00	-	10	50	0,00	102.672.000	0	0,00	0,00	Umum
<b>01.01.2.06</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Umum</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum yang terpenuhi</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>12.611.094.030</b>	<b>6.535.748.137</b>	<b>51,83</b>	<b>-51,83</b>	<b>Umum</b>
2.06.0001	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	1	1	0	1,0	100,00	WDRV	1	5	20,00	4.225.096.350	1.362.417.120	32,25	67,75	Umum
2.06.0002	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket	0	0	1	0	1,0	100,00	heEku-S	0	5	20,00	469.228.750	44.866.200	9,56	90,44	Umum
2.06.0003	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	0	0	1	0	1,0	100,00	wak0MLc	1	5	20,00	601.304.000	42.257.700	7,03	92,97	Umum
2.06.0004	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	0	0	1	0	1,0	100,00	kd6Pvkn	1,3	5	20,00	137.530.000	67.416.405	49,02	50,98	Umum
2.06.0005	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1,13	5	0,00	133.011.180	82.667.250	62,15	-62,15	Umum
2.06.0008	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30	Kunjunga	2	5	6	0	13,0	43,33	h1pHR9r	30	150	8,67	2.069.088.000	1.468.945.000	70,99	-27,66	Umum
2.06.0009	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	Laporan	4	6	10	0	20,0	1,33	s/1NknP	0	7500	0,27	4.804.145.750	3.389.286.462	70,55	-69,22	Umum
2.06.0010	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dok.	1	0	0	0	1,0	100,00	lMoAjZY	1	5	20,00	171.690.000	77.892.000	45,37	54,63	Umum
<b>01.01.2.07</b>	<b>Terwujudnya Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat daerah Kabupaten Kapuas Hulu</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terakomodir</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304.424.000</b>	<b>199.580.220</b>	<b>6,04</b>	<b>-6,04</b>	<b>Umum</b>
2.07.0002	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15	Unit	0	0	0	0	0,0	0,00	-	1	19	0,00	3.065.010.000	0	0,00	0,00	Umum
2.07.0005	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang tersedia	650	Unit	0	0	1	0	1,0	0,15	1hg0IKuf	650	3250	0,03	239.414.000	199.580.220	83,36	-83,21	Umum
<b>01.01.2.08</b>	<b>Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810.541.000</b>	<b>2.210.108.226</b>	<b>58,00</b>	<b>-58,00</b>	<b>Umum</b>
2.08.0001	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan	3	3	3	0	9,0	75,00	D9zyqbV	0	20224	0,04	49.714.000	24.120.000	48,52	26,48	Umum
2.08.0002	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan	3	3	3	0	9,0	75,00	K0lwZuvs	0	60	15,00	1.515.000.000	1.022.367.311	67,48	7,52	Umum
2.08.0003	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	5	5	0	10,0	83,33	02PHmL	0	36	27,78	924.615.000	531.600.000	57,49	25,84	Umum
2.08.0004	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Layanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan	0	3	6	0	9,0	75,00	bwPiWIV	0	60	15,00	1.321.212.000	632.020.915	47,84	27,16	Umum
<b>01.01.2.09</b>	<b>Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.991.945</b>	<b>1.373.187.588</b>	<b>69,25</b>	<b>-69,25</b>	<b>Umum</b>
2.09.0002	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34	Unit	3	0	12	0	15,0	44,12	vFDzchb	34	191	7,85	973.544.945	668.009.735	68,62	-24,50	UMUM
2.09.0006	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	Unit	3	2	5	0	10,0	90,91	AnPop-Br	11	55	18,18	634.197.000	330.467.250	52,11	38,80	UMUM
2.09.0009	Terpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	0	1	1	0	2,0	100,00	eglo1f_Fv	2	10	20,00	375.250.000	374.710.603	99,86	0,14	UMUM
<b>01.01.2.11</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelayanan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>69,2</b>	<b>69,23</b>	<b>ayXvr3Ez</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>69,23</b>	<b>950.447.000</b>	<b>489.521.908</b>	<b>51,50</b>	<b>17,73</b>	<b>UMUM</b>
2.11.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	3	0	9,0	75,00	PDDC7M	0	60	15,00	480.231.000	189.551.908	39,47	35,53	UMUM

Kode	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Sat	Perkembangan				Realisasi s/d Triwulan Ini	% Capaian Kinerja	Bukti Dukung	Realisasi Tahun Lalu	RENSTRA		Anggaran			Tingkat Efisiensi	Penanggung Jawab
					Tr 1	Tr 2	Tr 3	Tr 4					Target 2029	Kemajuan	Target	Realisasi s/d September	%		
2.11.0003	Terlaksananya kegiatan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Layanan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	Layanan	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	30	0,00	66.500.000	0	0,00	0,00	UMUM
2.11.0004	Tersedianya Pembayaran Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH	Jumlah Layanan Pembayaran Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12	Bulan	3	3	3	0	9,0	75,00	CqKak6	0	20	45,00	403.716.000	299.970.000	74,30	0,70	UMUM
01.01.2.13	Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi	Jumlah Kelembagaan Kabupaten yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	2	PD	0	0	1	0	1,0	50,00	qB_LNqI	0	3	33,33	595.519.000	296.157.992	49,73	14,72	ORGANISASI
.2.13.ind2		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	-	0	1	0,00					ORGANISASI
.2.13.ind3		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menetapkan Standar Pelayanan Publik	10	PD	6	6	6	0	12,0	120,00	DRJoJK7	7	50	24,00					ORGANISASI
.2.13.ind4		Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Reformasi Birokrasi	8	PD	6	6	6	0	6,0	75,00	_8QeBr3	6	8	75,00					ORGANISASI
.2.13.ind5		Jumlah Perangkat Daerah dengan Predikat AKIP Minimal B sesuai Hasil Evaluasi Tim APIP dari Perangkat Daerah yang dievaluasi	22	PD	3	9	5	0	17,0	77,27	XNIGfzcr	DE SALA	26	65,38					ORGANISASI
2.13.0001	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan	1	Dok	0	0	0	0	0,0	0,00	QRMO4f	0	1	0,00	200.259.500	89.646.332	44,77	-11,77	ORGANISASI
.0001.ind2		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Fasilitasi Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan	50	PD	10	7	16	0	33,0	66,00	Pjpxw6z	0	50	66,00					ORGANISASI
2.13.0002	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Bidang Ketatalaksanaan	27	PD	6	6	6	0	12,0	44,44	u67B73L	0	50	24,00	189.909.500	108.155.500	56,95	25,27	ORGANISASI
.0002.ind2		Jumlah Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Fasilitasi	10	PD	6	6	6	0	12,0	120,00	D0HuF3E	0	50	24,00					ORGANISASI
2.13.0003	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang difasilitasi dalam Peningkatan SAKIP	50	PD	15	10	15	0	40,0	80,00	XdDwZBl	0	50	80,00	205.350.000	98.356.160	47,90	29,60	ORGANISASI
.0003.ind2		Jumlah PD yang difasilitasi dalam Pelaksanaan RB	8	PD	6	6	6	0	6,0	75,00	Qgis48G	0	8	75,00					ORGANISASI
01.01.2.14	Meningkatnya Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Layanan Keprotokolan Pimpinan	81	%	27	18	32	0	77,3	95,40	txASoQA	0	86	89,85	8.605.912.300	4.529.937.554	52,64	54,94	PROKOPIM
.2.14.ind2		Persentase Layanan Komunikasi Pimpinan	82	%	41	45	12	0	97,6	119,08	lP9s_Nq3	0	85	114,88					PROKOPIM
.2.14.ind3		Persentase Pendokumentasian Tugas Pimpinan	86	%	23	24	46	0	93,1	108,26	zr7pfXP8	0	90	103,45					PROKOPIM
2.14.0001	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Hasil Fasilitasi Keprotokolan	110	Lyn	30	20	35	0	85,0	77,27	txASoQA	1	576	14,76	3.947.813.000	2.299.785.717	58,25	19,02	PROKOPIM
2.14.0002	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi	Jumlah Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	85	Lyn	35	38	10	0	83,0	97,65	lP9s_Nq3	1	448	18,53	1.809.264.500	1.180.775.937	65,26	32,38	PROKOPIM
2.14.0003	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Hasil Pendokumentasian Tugas Pimpinan	87	Lyn	20	21	40	0	81,0	93,10	zr7pfXP8	1	436	18,58	2.848.834.800	1.049.375.900	36,84	56,27	PROKOPIM
Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah	84	Nilai	0	0	86	0	85,9	102,26	yBkgIw	87,78	88	97,61	0	0	#####	#DIV/0!	Perkeu
TOTAL/ RATA-RATA					TOTAL/ RATA-RATA					63,38			27,13	109.910.889.604	72.468.021.897	65,93	-2,56		

Sumber: <https://bit.ly/Pengisian-Data-Kinerja-SetdaKH>  
<https://bit.ly/Pengukuran-Kinerja-SetdaKH>

Keterangan Warna:  
 Tidak Mencapai Target/ menjadi bahan evaluasi  
 Melebihi Target

Tidak mencapai target (<90%). Capaian triwulan I minimal 15%, triwulan II minimal 40%, triwulan III minimal 65%, dan triwulan IV minimal 90% dan Maksimal 120%  
Capaian Akhir RENSTRA pada Tahun 1 minimal 10%, Tahun 2 minimal 30%, Tahun 3 minimal 50%, Tahun 4 minimal 70% Tahun 5 minimal 90% dan Maksimal 120%  
RENSTRA Tahun 1 10% (Triwulan I minimal 2%, Triwulan II minimal 4%, Triwulan III minimal 7% dan Triwulan IV minimal 10%)  
Target pada RENSTRA dapat dilihat pada link: <https://bit.ly/RENSTRA-2025-30-SetdaKH-Excel>  
Tingkat efisiensi merupakan perbandingan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan. Dikatakan tidak efisien apabila persentase capaian keuangan lebih besar dari persentase capaian kinerja  
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja telah disepakati pada Perjanjian Kinerja : <https://bit.ly/PK-2025-SetdaKH>

  
Putussibau, 10 Oktober 2025  
Pj. Sekretaris Daerah  
Kabupaten. Kapuas Hulu  
Agustinus Stormandi